

MAMPU

KITA

KABAR DARI KITA

KABAR DWI BULANAN PROGRAM MAMPU

EDISI 13/2020 | JAN-FEB

Program MAMPU dan beberapa Mitra Pembangunan dukung BAPPENAS Luncurkan Stranas Pencegahan Perkawinan Anak



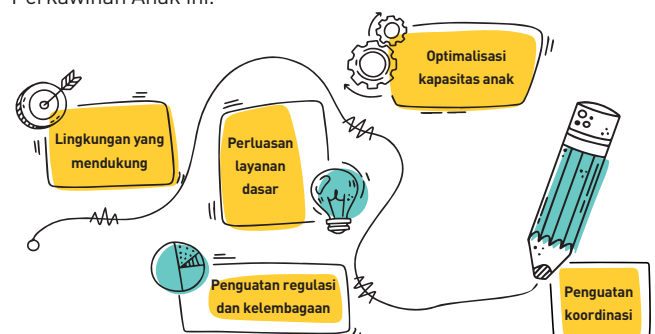
Setelah melalui proses penyusunan yang cukup intensif, dokumen **Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA)** dan **Laporan Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda** akhirnya diluncurkan Selasa, 4 Februari 2020 lalu di Hotel Pullman, Jakarta. Kedua dokumen tersebut, disebutkan oleh Menteri PPN, Suharso, menjadi bukti kolaborasi kuat antara pemerintah dengan pihak non pemerintah, khususnya Bappenas dan KPPPA dengan mitra pembangunan, organisasi masyarakat sipil, akademisi, tokoh agama dan kelompok anak muda.

Dokumen ini berisi lima strategi menurunkan prevalensi perkawinan anak.

1. Optimalisasi kapasitas anak untuk memastikan anak memiliki resiliensi dan mampu menjadi agen perubahan.
2. Mendorong terciptanya lingkungan yang mendukung terciptanya nilai, norma dan cara pandang yang mencegah perkawinan anak.
3. Perluasan aksesibilitas terhadap layanan dasar komprehensif yang menjamin pemenuhan hak kesejahteraan dan perlindungan anak.
4. Penguatan regulasi dan kelembagaan untuk menjamin pelaksanaan pencegahan perkawinan anak dan peningkatan kapasitas dan optimalisasi tata kelola kelembagaan.
5. Penguatan koordinasi pemangku kepentingan untuk meningkatkan sinergi dan konvergensi upaya pencegahan perkawinan anak.

Pada pidato sambutannya, Menteri Suharso menegaskan, "Pertemuan hari ini merupakan momentum yang sangat strategis bagi kita, pemerintah pusat dan daerah, mitra pembangunan, akademisi, organisasi masyarakat sipil dan media untuk berkoordinasi dan menjalin sinergi dalam membangun kesadaran, perhatian dan dukungan terhadap upaya pencegahan perkawinan anak".

Berdasarkan Laporan Pencegahan Perkawinan Anak, penurunan angka perkawinan anak dalam 10 tahun terakhir baru mencapai angka 3,5% di seluruh Indonesia. Lambatnya penurunan tersebut menempatkan Indonesia pada posisi 10 negara dengan angka perkawinan anak tertinggi dunia, dengan prevalensi 11,21% pada tahun 2018. Upaya pencegahan perkawinan anak merupakan salah satu wujud aksi kolektif yang didukung oleh Program MAMPU. Mitra MAMPU terlibat dalam berbagai forum advokasi untuk mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak kepada perempuan dan kesetaraan gender, seperti Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak ini.



Festival Kepemimpinan Perempuan dan Kongres Nasional V Koalisi Perempuan Indonesia untuk Mencapai SDGs



Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) gelar dua kegiatan besar awal tahun ini yaitu Festival Kepemimpinan Perempuan: “Perempuan & SDGs” dan Kongres Nasional V Koalisi Perempuan Indonesia yang telah berlangsung pada tanggal 20-23 Feb 2020 di Surabaya.

Dibuka oleh Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur dan dihadiri oleh Bintang Puspayoga, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, festival ini bertujuan untuk membumikan tujuan, sasaran dan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sehingga semua lapisan masyarakat terutama perempuan dapat memahami, merasa memiliki dan bisa berpartisipasi aktif dalam pencapaiannya. Dua kegiatan ini menghasilkan Piagam Sukolilo sebagai komitmen KPI untuk bekerja bersama mencapai tujuan SDGs serta terpilihnya Mike Verawati Tangka sebagai Sekretaris Jenderal KPI periode 2020-2025.

“Festival Kepemimpinan Perempuan dan SDGs ini merupakan wadah untuk menyusun strategi bersama dalam merespon beragam isu strategis yang berkaitan dengan pencapaian SDGs seperti penghapusan perkawinan anak, pendidikan sepanjang hayat, kesehatan perempuan, remaja dan anak, pemenuhan hak atas pangan dan keamanan, demokrasi dan perdamaian,” ungkap Sekjen KPI 2014-2019, Dian Kartikasari.

Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur dalam pidatonya menaruh harapan pada perempuan dari seluruh pelosok Indonesia untuk memberikan pemikiran dan masukan untuk meningkatkan keterampilan bagi perempuan khususnya di pedesaan.

“Kita seringkali temukan ketimpangan antara kota dan desa, akses perempuan di desa relatif terbatas. Bagaimana kita bisa menyentuh perempuan-perempuan di desa untuk membuka akses agar meningkatkan keterampilan, kesehatan dan kesejahteraan ekonominya.” ujar Khofifah. Dalam pidato kunci berjudul “Kepemimpinan Perempuan & Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan” Khofifah juga berpesan agar pemerintah, parlemen, masyarakat sipil dan media harus saling terkait programnya, saling bekerjasama untuk pencapaian SDGs.

Sejalan dengan Khofifah, Bintang Puspayoga dalam sambutannya menyoroti kepemimpinan perempuan. Bintang berharap semakin banyak perempuan yang mampu memimpin dari tingkat desa. Data KPPPA mencatat di tahun 2019, di Indonesia perempuan yang menjadi kepala desa hanya 5% dari 78.000 desa. Hanya 1 dari setiap 20 kepala desa adalah perempuan. “Sudah banyak ruang bagi perempuan untuk mengambil peran penting dalam kepemimpinan, tapi belum dimanfaatkan secara optimal karena kendala psikologis, kultural dan politik” kata Bintang.

Festival Kepemimpinan Perempuan: Perempuan & SDGs dihadiri oleh lebih dari 1.500 perempuan anggota KPI dari 1.100 desa di 20 kabupaten/kota yg tersebar di 20 provinsi. Ide, daya, dan harapan perempuan KPI di seluruh Indonesia, dituangkan dalam Piagam Sukolilo sebagai komitmen KPI untuk bekerja bersama mencapai tujuan SDGs.

Selamat bekerja pengurus nasional KPI periode 2020-2025!

FPL Gandeng Grab untuk Membantu Penyintas Kekerasan Seksual

Forum Pengada Layanan (FPL) sebagai salah satu mitra MAMPU dalam pencegahan kekerasan seksual, menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Grab di Yogyakarta, 24 Januari 2020. Penandatanganan kerjasama ditandai dengan penyerahan donasi untuk FPL yang digalang melalui platform *GrabRewards* yang dilakukan sejak Desember 2019 hingga 10 Januari 2020 yang lalu. Donasi yang terkumpul sebesar Rp 109.965.000 dari 2.860 pengguna aplikasi tersebut akan digunakan untuk program pemberdayaan ekonomi perempuan penyintas di 3 (tiga) wilayah yaitu wilayah Jawa, wilayah Sumatera-Kalimantan dan wilayah

Indonesia Timur. Peserta terbaik program pemberdayaan dari masing-masing wilayah akan memperoleh bantuan modal usaha agar mandiri secara finansial.

Dalam acara penandatanganan, Veni Siregar, Koordinator Sekretariat Nasional FPL menyatakan, “Kami sangat mengapresiasi pendekatan Grab yang komprehensif, dan kepeduliannya untuk mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan penyintas lewat *GrabRewards*. Perempuan korban seringkali tidak dapat keluar dari situasi kekerasan karena tidak

memiliki kemandirian finansial atau ekonomi. Kami juga berharap agar lebih banyak sektor swasta yang berkomitmen untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di masyarakat dan dunia kerja.”

Di kesempatan yang sama, Neneng Goenadi, Managing Director Grab Indonesia menyatakan dukungannya pada alumni program pemberdayaan ekonomi FPL, “Kami sangat terbuka jika nantinya ada alumni program pemberdayaan ekonomi FPL ini yang ingin bergabung ke Grab, misalnya sebagai *merchant GrabFood* atau mitra warung *GrabKios* karena layanan kami tersebar luas di Indonesia.”



Implementasi Perma 03 Tahun 2017, Jamin Keadilan bagi Perempuan Korban Kekerasan



Forum Pengada Layanan (FPL) bersama Komnas Perempuan melaksanakan sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 03 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Jakarta tanggal 22 Januari 2020.

Lahirnya Perma No. 03 tahun 2017 ini merupakan momentum untuk mendorong implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus-kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP), khususnya di lembaga pengadilan.

Oleh karena itu, FPL bersama Komnas Perempuan didukung oleh Program MAMPU melaksanakan sosialisasi Perma No. 03 tahun 2017 dan mengembangkan konsep SPPT-PKKTP di 5 wilayah, yaitu Provinsi Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Maluku dan Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini bertujuan untuk menjamin hak perempuan untuk mendapatkan akses keadilan dalam sistem peradilan pidana.

Catahu LBH APIK Aceh: 71% Pelaku Mengenal dan Memiliki Hubungan Personal dengan Korban

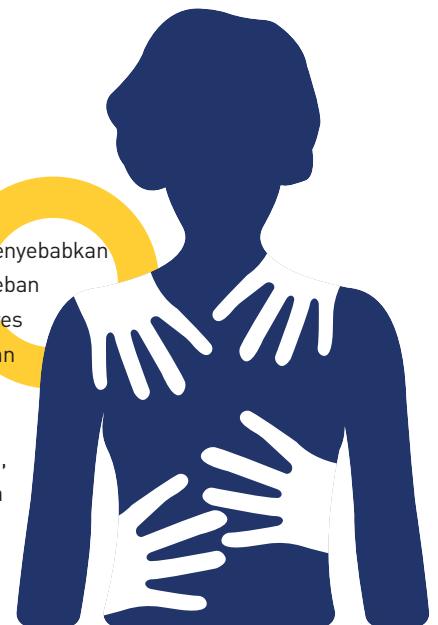
“Sepanjang 2019, kami mencatat 123 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, lebih tinggi dibanding jumlah kasus di tahun 2018 dengan jumlah 115 kasus,” jelas Direktur LBH APIK Aceh Roslina Rasyid di Lhokseumawe, 24 Februari 2020 pada acara Catatan Akhir Tahun (Catahu) Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Roslina juga menyebutkan bahwa 71% pelaku dikenal korban dan memiliki hubungan personal dengan korbannya.

Menurut Roslina, kekerasan terhadap perempuan dan anak dipicu oleh beberapa faktor, termasuk sistem hukum yang ada tidak mempertimbangkan korban sebagai pihak yang memiliki hak untuk diperlakukan secara adil, terutama dalam proses pembuktian kasus sehingga sebagian besar pelaku kejahatan bebas dari jeratan hukum. Selain itu kurangnya pondasi ketahanan dalam rumah tangga, persoalan ekonomi, dan komunikasi juga menjadi faktor yang mempengaruhi,” tambahnya.

LBH APIK Aceh juga mencatat bahwa bahwa dampak psikologis merupakan dampak terbesar yang ditanggung oleh perempuan.

“Tekanan psikologis menyebabkan korban menanggung beban mental yang berat dan stres hingga timbul keinginan bunuh diri,” jelasnya.

Selain LBH APIK Aceh, anggota Forum Pengada Layanan (FPL) wilayah barat juga menyusun data dan menggelar acara Catahu 2019 tentang Situasi Kekerasan terhadap Perempuan di wilayah kerja mereka masing-masing, seperti Yayasan PUPA Bengkulu, SPI Labuhanbatu, WCC Nurani Perempuan Padang dan Hapsari Deli Serdang. Peluncuran data secara bersama ini dilakukan guna menyelaraskan pemanfaatan data dalam sistem pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan untuk pemenuhan hak asasi perempuan.



Mitra MAMPU di NTB Serukan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak



FORUM NTB MAJU

DARI NTB UNTUK INDONESIA:
Dukung Pemenuhan
Hak Perempuan dan Anak



Forum NTB Maju menggelar diskusi publik bertajuk “Dari NTB untuk Indonesia: Dukung Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak” pada 23 Januari 2020. Diskusi yang bertempat di Kota Mataram ini bertujuan untuk membuka ruang dialog tentang perlindungan perempuan, anak dan kelompok rentan di Provinsi NTB, mendorong paradigma pembangunan berkelanjutan berbasis GESI (*Gender Equality* dan *Social Inclusion*) serta memperkuat jaringan masyarakat sipil untuk memastikan pemenuhan hak perempuan dan anak di NTB.

Forum NTB Maju terdiri dari lima lembaga mitra MAMPU yang fokus dalam pendampingan masyarakat khususnya perempuan dan anak, yakni Perkumpulan Panca Karsa (PPK), Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI), Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM), Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI).

“Forum NTB Maju melihat Provinsi NTB masih menghadapi tantangan pembangunan, terutama terkait kepentingan perempuan dan anak. Acara ini untuk membangun kesadaran bersama untuk bekerjasama untuk memastikan pemenuhan hak perempuan dan anak di NTB.” ucap Zahratun, ketua acara diskusi publik ini.

Beragam tantangan pembangunan tersebut antara lain; Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB tahun 2018 di angka 67,30 di bawah IPM nasional 71,39 (BPS, 2018); kasus kekerasan perempuan dan anak tahun 2016 tercatat sebesar 1.679 kasus (P2TP2A NTB, 2017), meningkat menjadi 1.821 kasus (2017) dan 1.475 kasus (2018) dimana 70% adalah kasus kekerasan inses.

Di Lombok Utara, tercatat 783 perempuan hamil dan 520 perempuan melahirkan pada rentang usia 10 – 19 tahun.

Sedangkan, di Lombok Timur 2.809 perempuan melahirkan di bawah usia 20 tahun (Dinkes Kab. Lombok Timur, 2019). Data ini mengindikasikan terjadinya perkawinan anak yang beresiko terjadinya KDRT dan *trafficking*.

NTB adalah daerah asal Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbesar ke-4 setelah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Terdapat 134.320 PMI asal NTB dimana 70% adalah perempuan (BNP2TKI, 2019). PMI asal NTB kerap mengalami kekerasan, karena itu PPK memulai inisiatif pendampingan 490 PMI sepanjang 2016-2019 yang mengalami berbagai kasus kekerasan di antaranya perdagangan manusia dan kekerasan seksual.

Diskusi menghadirkan enam narasumber, yaitu Ir. Andi Pramaria (Kepala DP3AP2KB NTB), Faturrohman (Sekretaris Dinas Sosial Lombok Utara), Ahmad Hidayat (Direktur Eksekutif PKBI NTB), TGH. Subeki Sasaki (Tokoh Agama NTB), Atun Wardatun (Akademisi IAIN Mataram) dan Venny Siregar (Seknas Forum Pengada Layanan). Narasumber menjabarkan kebijakan, kegiatan atau inisiatif yang mereka lakukan untuk menjamin perlindungan perempuan dan anak.

Diskusi publik ini menghasilkan enam kesimpulan, yaitu:

1. Upaya pemenuhan hak perempuan dan anak memerlukan kolaborasi, sinergi serta komitmen semua pihak. Upaya dan inovasi untuk perlindungan perempuan dan anak telah dilakukan di Kabupaten Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok Tengah dan Lombok Barat. Berharap ini juga dapat direplikasi ditempat lain.
2. Hukum formal berfungsi sebagai alat kontrol sosial, sehingga penting bagi kita semua untuk memperhatikan ruang lingkup, materi dan isi hukum formal tersebut. Serta mengkritisi dan berpartisipasi aktif mengawal penyusunan hukum formal untuk menghindari subyektifitas, diskriminasi dan bias gender.
3. Agama mengatur dengan baik peran perempuan dan laki-laki, bahkan menempatkan perempuan setara dalam pengambilan keputusan. Sehingga penting untuk melakukan pembongkaran dan pemaknaan ulang beragam teks agama yang bias gender.
4. Darurat kekerasan seksual di NTB. Tidak boleh ada lagi kekerasan dalam bentuk apapun di ranah manapun dan oleh siapapun.
5. Perlu aturan yang komprehensif mulai dari pencegahan, penanganan hukum, dan pemulihan terhadap korban kekerasan yang melindungi hak-hak korban.
6. Perlu didorong pendidikan karakter di seluruh tingkat pendidikan di NTB agar tidak mudah terprovokasi dengan beragam isu yang menebarkan kebencian dan radikalisme di NTB.

Kegiatan dihadiri oleh 100 peserta yang merupakan perwakilan dari seluruh elemen masyarakat NTB. Diharapkan semua pihak dapat menjalin kerjasama untuk membangun NTB terutama dalam pemenuhan hak perempuan dan anak.

'Aisyiyah Percepat Penurunan Stunting Melalui Rumah Gizi



Sebagai salah satu upaya menekan angka stunting di berbagai daerah di Indonesia, 'Aisyiyah melalui dukungan MAMPU meluncurkan program Rumah Gizi di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat dan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Sebelumnya, Rumah Gizi 'Aisyiyah telah berjalan di 14 kabupaten/kota.

"Ini merupakan tugas kita semua untuk bersinergi mengurangi stunting melalui perbaikan gizi," tukas Halima, Ketua Pimpinan Daerah 'Aisyiyah (PDA) Mamuju pada kegiatan peluncuran Rumah Gizi, 10 Januari 2020 lalu di Gedung Pemuda, Mamuju, Sulawesi Barat. "Gizi menentukan nutrisi pada anak agar menjadi generasi yang bisa diharapkan pada masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu mari kita cegah stunting mulai dari rumah sendiri dengan memenuhi kebutuhan nutrisi anak-anak kita." Habsi Wahid, Bupati Mamuju memperkuat pernyataan Halima.

Kegiatan yang dilakukan bersamaan dengan peluncuran program KKN Tematik Gizi dan Pencegahan Stunting ini melibatkan lebih dari 400 mahasiswa di seluruh Kab. Mamuju.

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) 'Aisyiyah, Siti Noordjannah Djohantini yang turut hadir pada acara ini mengatakan, "Jika program ini ditekuni, *insyaallah* dalam kurun waktu dua tahun, angka stunting akan menurun".

Selain di Mamuju, kegiatan serupa juga dilakukan di Kabupaten Cianjur, pada 1 Februari 2020. Kegiatan ini dihadiri oleh Plt. Bupati Cianjur, Herman Suherman, dan Koordinator Kemitraan Stranas Stunting TP2AK, Karnadi Hardijanto yang mengapresiasi kerja 'Aisyiyah dalam menjangkau kelompok akar rumput dan melakukan intervensi gizi secara komprehensif yang mengangkat kearifan lokal.

Ketua PDA Kabupaten Cianjur, Titin Suastini pada sambutannya menyampaikan bahwa ke depan, 'Aisyiyah Cianjur akan terus bermitra dengan pemerintah dalam upaya menurunkan stunting. "Melalui Rumah Gizi ini, kami sebagai mitra pemerintah akan mendorong upaya penurunan stunting melalui upaya kesehatan masyarakat, seperti edukasi kepada masyarakat dan tentunya melalui program Rumah Gizi 'Aisyiyah."

Tri Hastuti Nur Rochimah, Sekretaris PP 'Aisyiyah dan Koordinator 'Aisyiyah untuk Program MAMPU yang menghadiri acara menyatakan bahwa "'Aisyiyah berharap dapat berkontribusi dalam upaya berbasis komunitas menurunkan angka stunting di Indonesia melalui Rumah Gizi." Secara nasional 'Aisyiyah telah menerapkan Program Rumah Gizi di 16 kabupaten/kota sejak Januari 2018 lalu dalam rangka mendukung program pemerintah Indonesia Emas 2045. Wilayah tersebut akan terus meluas seiring dengan adanya replikasi di wilayah kerja 'Aisyiyah lainnya.

Berdaya Bersama Credit Union



Dua puluh enam tahun yang lalu merupakan awal Rismawati Bancin bergabung dengan Credit Union (CU) di desanya yakni di CU Sada Ukur, Desa Jambu Belang, Kabupaten Pakpak Barat. "Di daerah saya saat itu, perempuan agak diterbelakangkan karena dianggap tidak bisa apa-apa. Tapi sejak bergabung dengan CU, saya dilatih untuk mampu mengerjakan banyak hal terutama mengelola keuangan keluarga," jelas Rismawati. Risma, panggilan akrabnya, kemudian menjadi pengurus CU di desanya hingga diangkat menjadi pengurus di CU pusat yakni CU Pesada Perempuan.

Risma awalnya merupakan ibu rumah tangga biasa yang melakukan berbagai usaha untuk mendukung perekonomian keluarga. "Dulu berbagai usaha saya jalankan, mulai dari jualan makanan seperti gorengan, hingga rias pengantin. Saya juga bisa bertani berbagai macam seperti jeruk, coklat, padi, dan kopi. Melalui simpan pinjam CU, saya juga bisa menyekolahkan anak dan membangun rumah."

Credit Union atau biasa disingkat CU merupakan inisiatif yang digagas oleh Perkumpulan Sada Ahmo (PESADA) di Sumatera Utara sejak tahun 1992. PESADA yang berdiri sejak 1990 adalah anggota konsorsium PERMAMPU, sebuah konsorsium dari delapan organisasi perempuan di Sumatera yang dibentuk oleh Program MAMPU pada 2012. CU merupakan kelompok simpan pinjam yang dibentuk di pedesaan yang menasar perempuan yang memiliki akses terbatas terhadap informasi, pelayanan publik dan finansial. "Banyak pendidikan yang diberikan oleh PESADA melalui CU, bahwa perempuan harus berani dan mampu, jangan kalah dengan laki-laki. Hati saya tergerak; apa bedanya laki-laki dan perempuan? Kita sama-sama lulusan SMA. Kenapa mereka (laki-laki) bisa, lalu kita (perempuan) *nggak* bisa?" katanya dengan penuh semangat ketika menceritakan pengalamannya bersama CU. "Melalui CU juga, saya bisa mengikuti audiensi ke DPRD baik di tingkat kabupaten maupun provinsi untuk menyuarakan seruan-seruan perempuan. Di sana saya melihat jumlah perempuan sangat sedikit sehingga kami merasa kurang didengarkan dan diterima. Ketika teman-teman mendorong saya untuk jadi anggota DPRD, saya jadi semangat untuk mencalonkan diri," jelas Risma yang juga sangat didukung oleh suami dan anak-anaknya.

Tidak terbatas hanya untuk meningkatkan akses terhadap modal, CU juga bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada

perempuan seperti hak azasi, kesetaraan gender, kesehatan reproduksi, kepemimpinan, dan bahkan politik.

Meski sudah beroperasi sejak lama, namun rangkaian pendidikan politik kembali didorong di CU sejak 2017, dua tahun sebelum Risma akhirnya menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Pakpak Barat, Sumatera Utara. Ini bukan kali pertamanya ia mencalonkan diri. Di 2009, ia sempat mencoba peruntungannya sebagai anggota DPRD namun gagal. Baru di tahun 2019 ia kembali mencoba dan akhirnya berhasil menjadi anggota DPRD.

Saat ini, CU PESADA telah menjangkau 8 kabupaten dan 1 kotamadya di Sumatera Utara dengan 177 kelompok simpan pinjam yang memberikan manfaat bagi 10.850 anggotanya. Melalui CU, PESADA juga memberikan dukungannya terhadap partisipasi politik perempuan melalui alokasi 0,5-2% per tahun dari dana simpanan untuk melakukan pendidikan bagi perempuan, peningkatan kapasitas, dan kampanye bagi kandidat perempuan. Untuk menyuarakan aspirasi dan meningkatkan pengaruh perempuan, MAMPU memfasilitasi PERMAMPU dengan membentuk lebih banyak kelompok perempuan untuk meningkatkan akses terhadap informasi dan sumberdaya.



Tentang MAMPU

Kemitraan Australia - Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

MAMPU adalah program inisiatif bersama antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia. Program ini mendukung Pemerintah Indonesia dalam mencapai Target Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan membangun kepemimpinan dan pemberdayaan perempuan, sehingga akses perempuan terhadap pelayanan dasar dan program pemerintah meningkat.